



Dapat WTP, Malah Banyak Catatan

"Temuan ini harus dipertanyakan ke eksekutif. Kalau masih banyak catatan dan temuan, opininya kok WTP. Kami ingin tahu apa kriteria dalam memberikan opini WTP"

(I Ketut Mandia, Anggota Pansus LKPJ DPRD Bali)

DENPASAR, NusaBali

Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Bali, bukan ukuran prestasi dalam melaksanakan kinerja. DPRD Bali mengungkapkan banyak kewajiban Pemprov Bali

yang harus ditindaklanjuti terkait dengan laporan keuangan yang diaudit BPK.

Anggota Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Bali, I Ketut Mandia, Minggu (5/6), mengatakan WTP berturut-turut yang diperoleh Pemprov Bali menjadi pertanyaan besar. Karena dibalik penilaian WTP, ternyata banyak catatan-catatan dan kewajiban yang harus ditindaklanjuti Pemprov Bali. "Banyak catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti. Kami cek itu dari buku salinan hasil pemeriksaan masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," ungkap Mandia.

Mandia mengaku telah mendapatkan salinan pemer-

iksaan BPK. "Banyak anggota dewan yang tidak dapat. Saya tidak tahu kenapa. Kita sudah bedah itu dari tiga buku yang ada. Banyak anggaran yang diposkan tidak sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan yang benar.

Ini perlu ditindaklanjuti DPRD Bali dan akan kami pertanyakan di Pansus LKPJ. Sayang tidak semua anggota dewan yang dapat," ujar politisi PDIP asal Banjar Sente, Kecamatan Dawan, Klungkung ini.

Mandia membeberkan, masih banyak terjadinya salah posting alokasi anggaran dan munculnya angka-angka yang menjadi temuan. "Temuan ini harus dipertanyakan ke eksekutif. Kalau masih banyak catatan dan temuan, opininya kok WTP. Kami ingin tahu apa kriteria dalam memberikan opini WTP. Mungkin kita usulkan supaya sekali-sekali ada hearing dengan lembaga BPK dan pihak terkait," ujar Mandia.

Salah satu contohnya, kata dia, dalam laporan, ada disebutkan uraian pekerjaan yang seharusnya kegiatan tersebut dianggarkan di belanja modal senilai Rp 1,3 miliar lebih. Tetapi malah muncul pada belanja barang dan jasa. "Misalnya pemeliharaan

gedung, yang mana harusnya dilaporkan pemeliharaan gedung seharusnya memberikan nilai tambah pada aset yang ada. Kasus kayak ini muncul di 11 SKPD," ungkapnya.

Kemudian Mandia membeber dalam pemeriksaan BPK disebutkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dinilai tidak cermat dalam mengevaluasi anggaran kegiatan belanja modal, barang dan jasa yang diusulkan dalam rencana kerja anggaran. Selain

itu, pengguna anggaran pada SKPD dan kuasa pengguna anggaran pada biro di lingkungan Sekretariat Daerah juga disebutkan tidak memahami substansi kegiatan. "BPK memerintahkan

pada gubernur agar memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah lebih cermat dan evaluasi kegiatan belanja barang dan jasa yang diusulkan ke RKA SKPD," ujar Mandia.

Seperti diketahui sejak Tahun 2008 hingga 2012 Pemprov Bali meraih opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP). Kemudian berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) alias nilai tertinggi dalam pemberian opini laporan keuangan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra secara terpisah dikonfirmasi mengatakan, hasil audit BPK semuanya atas dasar standar akuntansi, penilaian atas bukti-bukti laporan keuangan secara menyeluruh. Penilaian WTP dari BPK juga cerminan laporan pertanggungjawaban penggunaan setiap rupiah anggaran daerah. "Kalaupun ada rekomendasi-rekomendasi memang itu menjadi perhatian kita untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik kedepan. Begitu dapat opini WTP, SKPD langsung melakukan evaluasi. Artinya ini tidak membuat kita terlena dan kita tetap ada tindak lanjut dan evaluasi-evaluasi tentang kelemahan dalam penyajian laporan keuangan," ujar Dewa Mahendra. **nat**

Edisi : Senin, 6 Juli 2015

Hal : 3



Dapat WTP, Malah Banyak Catatan

"Temuan ini harus dipertanyakan ke eksekutif. Kalau masih banyak catatan dan temuan, opininya kok WTP. Kami ingin tahu apa kriteria dalam memberikan opini WTP"

(I Ketut Mandia, Anggota Pansus LKPJ DPRD Bali)

DENPASAR, NusaBali

Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Bali, bukan ukuran prestasi dalam melaksanakan kinerja. DPRD Bali mengungkap banyak kewajiban Pemprov Bali

yang harus ditindaklanjuti terkait dengan laporan keuangan yang diaudit BPK.

Anggota Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Bali, I Ketut Mandia, Minggu (5/6), mengatakan WTP berturut-turut yang diperoleh Pemprov Bali menjadi pertanyaan besar. Karena dibalik penilaian WTP, ternyata banyak catatan-catatan dan kewajiban yang harus ditindaklanjuti Pemprov Bali. "Banyak catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti. Kami cek itu dari buku salinan hasil pemeriksaan masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," ungkap Mandia.

Mandia mengaku telah mendapatkan salinan pemer-

iksaan BPK. "Banyak anggota dewan yang tidak dapat. Saya tidak tahu kenapa. Kita sudah bedah itu dari tiga buku yang ada. Banyak anggaran yang diposkan tidak sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan yang benar.

Ini perlu ditindaklanjuti DPRD Bali dan akan kami pertanyakan di Pansus LKPJ. Sayang tidak semua anggota dewan yang dapat," ujar politisi PDIP asal Banjar Sente, Kecamatan Dawan, Klungkung ini.

Mandia membeberkan, masih banyak terjadinya salah posting alokasi anggaran dan munculnya angka-angka yang menjadi temuan. "Temuan ini harus dipertanyakan ke eksekutif. Kalau masih banyak catatan dan temuan, opininya kok WTP. Kami ingin tahu apa kriteria dalam memberikan opini WTP. Mungkin kita usulkan supaya sekali-sekali ada hearing dengan lembaga BPK dan pihak terkait," ujar Mandia.

Salah satu contohnya, kata dia, dalam laporan, ada disebutkan uraian pekerjaan yang seharusnya kegiatan tersebut dianggarkan di belanja modal senilai Rp 1,3 miliar lebih. Tetapi malah muncul pada belanja barang dan jasa. "Misalnya pemeliharaan

gedung, yang mana harusnya dilaporkan pemeliharaan gedung seharusnya memberikan nilai tambah pada aset yang ada. Kasus kayak ini muncul di 11 SKPD," ungkapnya.

Kemudian Mandia membeber dalam pemeriksaan BPK disebutkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dinilai tidak cermat dalam mengevaluasi anggaran kegiatan belanja modal, barang dan jasa yang diusulkan dalam rencana kerja anggaran. Selain

itu, pengguna anggaran pada SKPD dan kuasa pengguna anggaran pada biro di lingkungan Sekretariat Daerah juga disebutkan tidak memahami substansi kegiatan. "BPK memerintahkan

pada gubernur agar memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah lebih cermat dan evaluasi kegiatan belanja barang dan jasa yang diusulkan ke RKA SKPD," ujar Mandia.

Seperti diketahui sejak Tahun 2008 hingga 2012 Pemprov Bali meraih opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP). Kemudian berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) alias nilai tertinggi dalam pemberian opini laporan keuangan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra secara terpisah dikonfirmasi mengatakan, hasil audit BPK semuanya atas dasar standar akuntansi, penilaian atas bukti-bukti laporan keuangan secara menyeluruh. Penilaian WTP dari BPK juga cerminan laporan pertanggungjawaban penggunaan setiap rupiah anggaran daerah. "Kalaupun ada rekomendasi-rekomendasi memang itu menjadi perhatian kita untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik kedepan. Begitu dapat opini WTP, SKPD langsung melakukan evaluasi. Artinya ini tidak membuat kita terlena dan kita tetap ada tindak lanjut dan evaluasi-evaluasi tentang kelemahan dalam penyajian laporan keuangan," ujar Dewa Mahendra. **nat**

Edisi : Senin, 6 Juli 2015

Hal : 3



Piutang PBB

Capai Rp 48 Miliar

Atas dorongan BPK, Dispenda mulai melakukan pendataan sejak dua tahun terakhir dan menemukan ratusan wajib PBB mengalami pendataan ganda.

TABANAN, NusaBali

Piutang PBB (Pajak Bumi Bangunan) Kabupaten Tabanan mencapai Rp 48 miliar. Jumlah ini berdasarkan data yang diberikan KPP (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) Tabanan. Hanya saja, piutang sebesar itu belum dapat dipastikan karena dibutuhkan pendataan ulang.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Tabanan

(Dispenda), Wayan Sudarma merangkan dalam piutang tersebut ada tunggakan semu dengan berbagai macam alasan. Sehingga Dispenda menurunkan tim untuk melakukan pendataan kembali. Sudarma mengakui database mengenai

piutang PBB Tabanan sudah lama tidak diperbaharui dan cukup amburadul. Namun setelah didorong oleh BPK, pihaknya mulai melakukan pendataan sejak dua tahun terakhir. Sehingga didapati ratusan wajib PBB mengalami pendataan ganda.

Sudarma menjelaskan, pendataan ganda yang dimaksud adalah pemilik tanah menjual tanahnya, namun luas tanah awal dan tanah yang dijual masuk dalam data PBB. "Mi-

salnya dari tanah 100 are dijual 50 are. Yang 100 are tetap terdata wajib PBB dan 50 are pun tercatat pula. Hasilnya ada tambahan semu 50 are," jelas Sudarma, Minggu (5/7). Permasalahan lainnya yang ditemukan adalah seperti tanah yang telah menjadi pelayanan publik seperti jalan, sekolah maupun perkantoran masih terdaftar sebagai wajib PBB yang menyebabkan tunggakan semu. Dikatakan data ini pun

jumlahnya mencapai ratusan.

Karena data yang dikonfirmasi sangat banyak, Sudarma mengaku belum bisa memastikan berapa yang tunggakan semu dan piutang asli yang belum dibayarkan masyarakat. Kurangnya tenaga yang terjun ke lapangan dan partisipasi masyarakat serta dana menjadi penyebab pihaknya mengalami hambatan selama pendataan. "Terkadang setelah menjual tanahnya, masyarakat enggan mengkonfirmasi dan memperbaharui PBBnya, sehingga pemilik baru tidak terdata," ujarnya. Hal ini yang membuat konfirmasi pendataan melalui surat menjadi susah, sehingga tim verifikasi harus terjun langsung ke lapangan.

Selain itu, tunggakan semu juga tercatat karena ada tanah yang terdata justru tidak ada bentuk fisiknya. "Nama pemiliknya terdata tetapi setelah dikonfirmasi, tanahnya justru

tidak ketemu," kata Sudarma. Ia mengatakan kondisi seperti ini telah berlangsung bertahun-tahun sehingga melebihi data pemasukan PBB. Sementara Pemkab Tabanan berikan subsidi pajak bagi kawasan hijau di Tabanan yang berjumlah 2.000 hektare sejak tahun 2015.

Sudarma mengatakan ada penurunan penerimaan PBB sekitar Rp 217 juta dibandingkan tahun sebelumnya. "Tahun 2014, penerimaan PAD Tabanan lewat PBB mencapai Rp 15 miliar lebih," ungkapnya. Dikatakan, meski terjadi penurunan, ia optimis pendapatan PAD Tabanan dari PBB bisa meningkat. "Kami sedang dalam pendataan. Beberapa lahan ada yang berubah menjadi bangunan dan tentu biaya PBBnya berbeda. Sehingga kami optimis pendapatan PBB bisa meningkat meski ada subsidi untuk kawasan hijau," tandas Sudarma. **cr55**



• NUSABALI/SUGIANTO

Nyoman Sudarma

Edisi : Senin, 6 Juli 2015

Hal : 7



Piutang PBB

Capai Rp 48 Miliar

Atas dorongan BPK, Dispenda mulai melakukan pendataan sejak dua tahun terakhir dan menemukan ratusan wajib PBB mengalami pendataan ganda.

TABANAN, NusaBali

Piutang PBB (Pajak Bumi Bangunan) Kabupaten Tabanan mencapai Rp 48 miliar. Jumlah ini berdasarkan data yang diberikan KPP (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) Tabanan. Hanya saja, piutang sebesar itu belum dapat dipastikan karena dibutuhkan pendataan ulang.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Tabanan

(Dispenda), Wayan Sudarma merangkan dalam piutang tersebut ada tunggakan semu dengan berbagai macam alasan. Sehingga Dispenda menurunkan tim untuk melakukan pendataan kembali. Sudarma mengakui database mengenai

piutang PBB Tabanan sudah lama tidak diperbaharui dan cukup amburadul. Namun setelah didorong oleh BPK, pihaknya mulai melakukan pendataan sejak dua tahun terakhir. Sehingga didapati ratusan wajib PBB mengalami pendataan ganda.

Sudarma menjelaskan, pendataan ganda yang dimaksud adalah pemilik tanah menjual tanahnya, namun luas tanah awal dan tanah yang dijual masuk dalam data PBB. "Mi-

salnya dari tanah 100 are dijual 50 are. Yang 100 are tetap terdata wajib PBB dan 50 are pun tercatat pula. Hasilnya ada tambahan semu 50 are," jelas Sudarma, Minggu (5/7). Permasalahan lainnya yang ditemukan adalah seperti tanah yang telah menjadi pelayanan publik seperti jalan, sekolah maupun perkantoran masih terdaftar sebagai wajib PBB yang menyebabkan tunggakan semu. Dikatakan data ini pun

jumlahnya mencapai ratusan.

Karena data yang dikonfirmasi sangat banyak, Sudarma mengaku belum bisa memastikan berapa yang tunggakan semu dan piutang asli yang belum dibayarkan masyarakat. Kurangnya tenaga yang terjun ke lapangan dan partisipasi masyarakat serta dana menjadi penyebab pihaknya mengalami hambatan selama pendataan. "Terkadang setelah menjual tanahnya, masyarakat enggan mengkonfirmasi dan memperbaharui PBBnya, sehingga pemilik baru tidak terdata," ujarnya. Hal ini yang membuat konfirmasi pendataan melalui surat menjadi susah, sehingga tim verifikasi harus terjun langsung ke lapangan.

Selain itu, tunggakan semu juga tercatat karena ada tanah yang terdata justru tidak ada bentuk fisiknya. "Nama pemiliknya terdata tetapi setelah dikonfirmasi, tanahnya justru

tidak ketemu," kata Sudarma. Ia mengatakan kondisi seperti ini telah berlangsung bertahun-tahun sehingga melebihi data pemasukan PBB. Sementara Pemkab Tabanan berikan subsidi pajak bagi kawasan hijau di Tabanan yang berjumlah 2.000 hektare sejak tahun 2015.

Sudarma mengatakan ada penurunan penerimaan PBB sekitar Rp 217 juta dibandingkan tahun sebelumnya. "Tahun 2014, penerimaan PAD Tabanan lewat PBB mencapai Rp 15 miliar lebih," ungkapnya. Dikatakan, meski terjadi penurunan, ia optimis pendapatan PAD Tabanan dari PBB bisa meningkat. "Kami sedang dalam pendataan. Beberapa lahan ada yang berubah menjadi bangunan dan tentu biaya PBBnya berbeda. Sehingga kami optimis pendapatan PBB bisa meningkat meski ada subsidi untuk kawasan hijau," tandas Sudarma. **cr55**



• NUSABALI/SUGIANTO

Nyoman Sudarma

Edisi : Senin, 6 Juli 2015

Hal : 7



Tunjangan Sertifikasi

Rp 16 Miliar Ngadat

★ Sudah Enam Bulan,
4.431 Guru Belum Menerima

Dikhawatirkan
berlarutnya
pencairan dana
sertifikasi itu
mempengaruhi
etos kerja guru
dalam mengemban
tugas mendidik
siswa.

AMLAPURA, NusaBali

Para guru di Karangasem terhitung enam bulan sejak Januari-Juni 2015, ternyata belum menerima tunjangan sertifikasi. Padahal dana itu telah tersedia di APBD 2015 sebesar Rp 16 miliar yang dianggarkan bagi total 4.431 guru. Pihak dinas berdalih, belum cairnya dana sertifikasi

itu, karena terjadi banyak persoalan teknis.

Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Disdikpora Karangasem I Ketut Sudana berdalih, belum cairnya dana sertifikasi, karena terjadi banyak persoalan teknis. Hal itu dipaparkan di Amlapura, Minggu (5/7).

Sudana menjelaskan beragam persoalan yang terjadi selama ini, atas macetnya pengalokasian tunjangan guru bersertifikasi. Mulai dari persoalan guru itu sendiri yang banyak belum memenuhi syarat mengajar minimal 24 jam, sehingga belum bisa diusulkan mencairkan tunjangan.

Persoalan lain, SK pencairan dana sertifikasi tidak turun bersamaan untuk semua guru. Awal sertifikasi itu katanya, dikerjakan operator sekolah, diteruskan ke Disdikpora Karangasem, ber-



Sambungan - - -

lanjut usulannya ke pusat, agar SK bisa terbit. "Setelah SK Pusat turun, Disdikpora melakukan verifikasi. Terkadang SK Pusat tidak cocok menyangkut gaji pokok guru tersebut sehingga terjadi masalah," kata Sudana.

Jika di SK Pusat mengenai gaji pokok guru bersangkutan telah klar, berdasarkan itulah bisa diusulkan ke bagian keuangan. "Jadi SK Pusat tidak turun bersamaan, itulah hambatannya, pencairan belum bisa terlaksana," tambahnya.

Kabag Keuangan Setdakab I Dewa Made Ari Menaka juga mengakui, dana sertifikasi Rp 16 miliar belum cair. "Ya, belum cair karena belum diamprah," kata Dewa Ari-menaka dihubungi terpisah.

Masalah belum cairnya tunjangan bagi guru itu pun menjadi sorotan dan pertanyaan bagi kalangan DPRD Karanagsem. Ketua Komisi I DPRD Karan-

gasem I Komang Sudanta, dan anggota DPRD I Wayan Suastika menyangkan kenyataan itu. Sudanta memaparkan, selama ini menerima banyak aspirasi dari kalangan guru yang telah lulus sertifikasi, ternyata selama tahun 2015, belum terima tunjangan tersebut.

"Kami ingin tahu apa masalahnya, hingga dana sertifikasi belum cair. Padahal saya lihat di APBD ada dana Rp 16 miliar, untuk membayar tunjangan Januari-Juni," katanya.

Sudanta khawatir, ngadatnya pencairan dana sertifikasi mempengaruhi etos kerja para tenaga pendidik. "Dana sertifikasi untuk tiap guru yang telah lulus sertifikasi. Itu menyangkut hak guru, yang selama ini mengemban tugas mendidik siswa agar lebih cerdas," tambahnya.

Anggota DPRD I Wayan Suas-

tika juga mengingatkan, agar dana sertifikasi Rp 16 miliar, tidak lama nganggur. "Ternyata dana sertifikasi belum terserap, padahal ribuan guru membutuhkan, terlebih lagi jelang tahun ajaran baru 2015/2016, dan beruntunnya hari raya besar. Kenyataannya belum diamprah," jelas Suastika, politisi PDIP dari Banjar Juuk Legi, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat.

Bahkan Suastika memiliki catatan guru yang telah bersertifikasi, belum mendapatkan tunjangan selama Januari-Juni: guru TK sebanyak 68 guru PNS dan 15 non PNS, guru SD sebanyak 2.674 PNS dan 128 non PNS, guru SMP 860 PNS dan 38 non PNS, guru SMA 401 PNS dan 17 non PNS, guru SMK 19 PNS dan 115 non PNS, pengawas 36 orang, SLB (Sekolah Luar Biasa) 19 PNS, total 4.431 guru. **k16**



Tunjangan Sertifikasi Rp 16 Miliar Ngadat

★ Sudah Enam Bulan,
4.431 Guru Belum Menerima

Dikhawatirkan
berlarutnya
pencairan dana
sertifikasi itu
mempengaruhi
etos kerja guru
dalam mengemban
tugas mendidik
siswa.

AMLAPURA, NusaBali

Para guru di Karangasem terhitung enam bulan sejak Januari-Juni 2015, ternyata belum menerima tunjangan sertifikasi. Padahal dana itu telah tersedia di APBD 2015 sebesar Rp 16 miliar yang dianggarkan bagi total 4.431 guru. Pihak dinas berdalih, belum cairnya dana sertifikasi

itu, karena terjadi banyak persoalan teknis.

Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Disdikpora Karangasem I Ketut Sudana berdalih, belum cairnya dana sertifikasi, karena terjadi banyak persoalan teknis. Hal itu dipaparkan di Amlapura, Minggu (5/7).

Sudana menjelaskan beragam persoalan yang terjadi selama ini, atas macetnya pengalokasian tunjangan guru bersertifikasi. Mulai dari persoalan guru itu sendiri yang banyak belum memenuhi syarat mengajar minimal 24 jam, sehingga belum bisa diusulkan mencairkan tunjangan.

Persoalan lain, SK pencairan dana sertifikasi tidak turun bersamaan untuk semua guru. Awal sertifikasi itu katanya, dikerjakan operator sekolah, diteruskan ke Disdikpora Karangasem, ber-



Sambungan - - -

lanjut usulannya ke pusat, agar SK bisa terbit. "Setelah SK Pusat turun, Disdikpora melakukan verifikasi. Terkadang SK Pusat tidak cocok menyangkut gaji pokok guru tersebut sehingga terjadi masalah," kata Sudana.

Jika di SK Pusat mengenai gaji pokok guru bersangkutan telah klar, berdasarkan itulah bisa diusulkan ke bagian keuangan. "Jadi SK Pusat tidak turun bersamaan, itulah hambatannya, pencairan belum bisa terlaksana," tambahnya.

Kabag Keuangan Setdakab I Dewa Made Ari Menaka juga mengakui, dana sertifikasi Rp 16 miliar belum cair. "Ya, belum cair karena belum diamprah," kata Dewa Ari-menaka dihubungi terpisah.

Masalah belum cairnya tunjangan bagi guru itu pun menjadi sorotan dan pertanyaan bagi kalangan DPRD Karanagsem. Ketua Komisi I DPRD Karan-

gasem I Komang Sudanta, dan anggota DPRD I Wayan Suastika menyangkan kenyataan itu. Sudanta memaparkan, selama ini menerima banyak aspirasi dari kalangan guru yang telah lulus sertifikasi, ternyata selama tahun 2015, belum terima tunjangan tersebut.

"Kami ingin tahu apa masalahnya, hingga dana sertifikasi belum cair. Padahal saya lihat di APBD ada dana Rp 16 miliar, untuk membayar tunjangan Januari-Juni," katanya.

Sudanta khawatir, ngadatnya pencairan dana sertifikasi mempengaruhi etos kerja para tenaga pendidik. "Dana sertifikasi untuk tiap guru yang telah lulus sertifikasi. Itu menyangkut hak guru, yang selama ini mengemban tugas mendidik siswa agar lebih cerdas," tambahnya.

Anggota DPRD I Wayan Suas-

tika juga mengingatkan, agar dana sertifikasi Rp 16 miliar, tidak lama nganggur. "Ternyata dana sertifikasi belum terserap, padahal ribuan guru membutuhkan, terlebih lagi jelang tahun ajaran baru 2015/2016, dan beruntunnya hari raya besar. Kenyataannya belum diamprah," jelas Suastika, politisi PDIP dari Banjar Juuk Legi, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat.

Bahkan Suastika memiliki catatan guru yang telah bersertifikasi, belum mendapatkan tunjangan selama Januari-Juni: guru TK sebanyak 68 guru PNS dan 15 non PNS, guru SD sebanyak 2.674 PNS dan 128 non PNS, guru SMP 860 PNS dan 38 non PNS, guru SMA 401 PNS dan 17 non PNS, guru SMK 19 PNS dan 115 non PNS, pengawas 36 orang, SLB (Sekolah Luar Biasa) 19 PNS, total 4.431 guru. **k16**